

**PEMBANGUNAN, NEOLIBERALISME DAN KESENJANGAN:
BELAJAR DARI PENGALAMAN AMERIKA LATIN**

Endriady Edy Abidin

Dosen Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Fajar Makassar

Abstract

Development has become the credo of the modern world. Almost every country in the world commits to this new religion. However, economic growth driven development causes a wide inequality between the have and have not countries, especially during the era of neo liberalism. This essay will discuss the cause of inequality rise from neo liberalism and show how the Latin American Countries with their populist policy reduce the inequality in their country.

Keywords: *Development, inequality, neo-liberalism, Latin America*

Pendahuluan

Pembangunan telah menjadi sebuah kredo universal dalam dunia modern. Kata “pembangunan” senantiasa menjadi bumbu penyedap dalam setiap pidato para pemimpin negara, organisasi internasional hingga ke level kelurahan. Dalam dunia akademik, hampir tiada henti bermunculan “teori-teori mulia” tentang pembangunan. Teori Harrod-Domar: tabungan dan investasi, teori pertumbuhan ekonomi dari W.W. Rostow, *need for achievement* dari McClelland, teori penciptaan tenaga kerja, teori pembangunan desa terpadu, teori redireksi investasi, teori pemenuhan kebutuhan dasar, *sustainable development*, liberal neo-klasik dan *developmental state* adalah beberapa di antaranya.

Namun dalam prakteknya, model pembangunan *mainstream*, yang mengejar pertumbuhan ekonomi, justru menjadi bencana. Tidak sedikit negara yang menjadi negeri “salah urus” dikarenakan mimpi *progress* yang ditawarkan oleh pembangunan ini. Bermimpi akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, akan menetesnya kesejahteraan dari kaum pemilik modal kepada kaum pekerja dan masyarakat, pembangunan *mainstream* justru membawa kesenjangan yang semakin lebar antara *the haves dan the have nots*. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk. Tanda tanya besar kemudian muncul, mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankan pembangunan dalam janji-janjinya akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan seperti saat ini yang dinikmati oleh negara-negara maju di Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia Timur? Mengapa kesenjangan itu bisa muncul? Bagaimana sebaiknya pembangunan dilakukan agar kesenjangan menjadi berkurang? Adakah alternatif bagi pembangunan yang berbasis pertumbuhan ekonomi? Penulis akan coba menjawabnya dalam essay ini.

Sekilas tentang Pengertian dan Pengukuran Kesenjangan

Menurut Firebough, kesenjangan secara sederhana dapat dibahasakan sebagai persoalan tiadanya kesetaraan. Kesetaraan ada ketika *resource* (misalnya pendapatan) didistribusikan secara adil kepada tiap-tiap bagian, entah itu rumah tangga atau negara atau bangsa (2003: 71). Dalam konteks sosial, kesenjangan mengacu pada perbedaan akses terhadap terhadap *social goods* seperti pasar tenaga kerja dan sumber-sumber pendapatan lainnya, layanan kesehatan serta bentuk-bentuk partisipasi dan representasi politik (dalam <http://www.ucl.ac.uk/ceelbas/research/socialine-quality>).

Untuk mengukur tingkat kesenjangan, terdapat beberapa metode yang lazim digunakan. *Pertama*, Metode Atkinson yang menggunakan model individualistik yang melihat objek yang diukur dari perbedaan di antara individu dan agregatnya dalam suatu indeks tunggal (Atkinson dalam Grusky dan Kanbur, 2006: 25). *Kedua*, pengukuran tingkat kesenjangan yang dilakukan dengan cara melihat berapa persen dari PNB yang diraih oleh 40 persen penduduk termiskin, berapa persen yang diraih dari 40 penduduk golongan menengah dan berapa persen oleh 20 persen penduduk terkaya. Jika 20 persen penduduk terkaya meraih lebih dari 50 persen Produk Nasional Bruto, dan sisanya di bagi oleh 80 persen penduduk lainnya, maka kesenjangan antara penduduk yang kaya dan miskin dianggap besar (Budiman, 2000: 3-4). *Ketiga*, pengukuran dengan menggunakan indeks gini. Indeks ini diukur dalam skala 0 sampai 1. Bila indeks gini sama dengan 1, maka terjadi kesenjangan yang maksimal; bila 0, ketimpangan tidak ada. Jadi semakin kecil indeks gini, semakin kecil tingkat kesenjangan pembagian pendapatan dalam masyarakat. (Budiman, 2000).

Pembangunan Neoliberalisme dan Munculnya kesenjangan

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Suatu masyarakat atau negara dinilai berhasil melaksanakan pembangunan apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan kata lain, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau negara ditambah dengan konsumsinya setiap tahunnya. Dalam bahasa teknis ekonominya, seberapa besar Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mampu di-*generate* (Budiman, 2000: 2).

Memasuki era 1980an, berkembang sebuah model yang menjadikan pasar sebagai penuntun dalam pembangunan. Model ini dikenal dengan liberal neo-klasik atau neoliberalisme. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas tapi dengan penekanan pada: (1) Disiplin fiskal: defisit budget pemerintah haruslah tidak lebih dari 2 persen GDP; (2) Prioritas belanja publik: pengeluaran untuk belanja publik harus dikurangi; (3) Reformasi pajak: insentif dan kemudahan bagi pengusaha terhadap segala sesuatu yang berhubungan

dengan pajak; (4) Liberalisasi finansial: tingkat bunga yang ditentukan oleh pasar; (5) Nilai tukar: bunga bank yang kompetitif untuk mamacu ekspor non-tradisional; (6) Liberalisasi perdagangan: segala restriksi pada impor harus dirubah dan tidak lebih dari 10 % dalam tempo waktu 3 -10 tahun; (7) Investasi asing langsung; penghapusan segala bentuk halangan terhadap masuknya investasi asing; (8) Privatisasi: penjualan kepemilikan perusahaan-perusahaan negara kepada pihak swasta; (9) Deregulasi: penghapusan regulasi yang menghalangi kompetisi pasar; (10) Hak kekayaan intelektual; sistem hukum yang ada harus melindungi kekayaan intelektual tanpa tarif yang berlebihan. (Williamson dalam Peet dan Hatrwick, 1999: 51). Selain sepuluh kebijakan di atas (yang dikenal dengan Konsensus Washington atau *Structural Adjustment Programs* atau SAP), juga diperkenalkan model reformasi perburuhan yang menggunakan sistem fleksibilitas untuk menghasilkan upah buruh yang lebih murah (Munck, 2003: 53).

Dari kebijakan-kebijakan tersebut di atas, menurut penjaga gawangnya (IMF dan Bank Dunia), akan tercapai tiga hal : (1) Terbukanya pasar dalam negeri yang menyatu ke dalam pasar global; (2) Berkurangnya intervensi pemerintah terhadap perekonomian dan meningkatkan peranan kementerian perekonomian melalui disiplin fiskal, anggaran berimbang, dan reformasi pajak; (3) Meningkatkan signifikansi pasar dalam alokasi sumber daya dan menjadikan sektor swasta sebagai instrument utama dalam pertumbuhan ekonomi. (Gwynne dalam Kirby, 2003: 56).

Kebijakan-kebijakan liberal neo-klasik ini kemudian dianut oleh hampir semua negara. Menurut David Harvey dalam *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis* (2009), saat ini hampir tidak ada negara yang tidak menganut neoliberalisme. Negara-negara kesejahteraan tua-pun seperti Selandia Baru dan Swedia juga turut mengadopsi model ini, walaupun tidak secara keseluruhan. Model pembangunan yang bias kelas ini menjadikan kelas *the haves*, dengan kekuatan kapitalnya, mendapatkan ruang yang begitu luas dalam perekonomian, sementara di sisi lain, kelas pekerja –yang upahnya menurun akibat sistem fleksibilitas- dan rakyat miskin –yang subsidiya dikurangi atau dicabut- semakin termarjinalkan.

Terpolarisasinya kekayaan ke tangan segelintir *the haves* menjadikan kesenjangan di dunia semakin melebar dalam beberapa dasawarsa terakhir. Laporan yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 1992 memperkirakan bahwa 20 persen dari populasi dunia yang tinggal di negara-negara maju, memperoleh 82,7 persen dari total pendapatan dunia, sementara 20 persen lainnya yang tinggal di negara-negara miskin memperoleh 1,4 persen. Pada tahun 1989, rata-rata pendapatan dari 20 persen masyarakat yang hidup di

negara-negara paling kaya mencapai 60 kali lebih tinggi daripada 20 persen yang hidup di negara-negara paling miskin. Rasio ini merupakan dua kali rasio tahun 1950, yang sebesar 30 kali (Khor dalam Winarno, 2007: 84).

Sementara di negara-negara berkembang, misalnya dalam konteks Indonesia, neoliberalisme menghasilkan 40 persen kelompok penduduk berpendapatan terendah makin tersisih. Kelompok penduduk ini hanya menikmati porsi pertumbuhan ekonomi 19,2 persen pada 2006, makin mengecil dari 20,92 persen pada 2000. Sebaliknya, 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 42,19 persen menjadi 45,72 persen dalam rentang waktu yang sama (dalam [http://www.mudrajad.com/upload/Ketimpangan Pendapatan Melebar pdf](http://www.mudrajad.com/upload/Ketimpangan_Pendapatan_Melebar.pdf)).

Neoliberalisme di Amerika Latin

Di Amerika Latin, kebijakan neoliberal mulai meluas diadopsi pasca krisis hutang awal 1980an. Krisis ekonomi tersebut telah memaksa negara-negara Latin untuk berpaling kepada lembaga donor internasional (*International financial Institutions*) atas saran penasehat ekonomi dan politik mereka (Gwyne dan Kay, 2004: 16). Kehadiran lembaga donor internasional (IMF dan Bank Dunia) dengan resep andalan “satu untuk semua”-nya, *Structural Adjustment Program* (SAP), menjadikan negara-negara Amerika Latin yang tadinya tertutup membuka diri terhadap reformasi neoliberal dan pasar global. Kebijakan *open economy* ini sekaligus mengakhiri jalan panjang *state-led industrialization, inward-looking policy* dan *Import Substitution Industry* yang selama 20 tahun lebih digunakan negara-negara Amerika Latin sebagai kebijakan pembangunannya (Kirby, 2003: 51).

Peralihan negara-negara Amerika Latin ke model neoliberalisme oleh banyak kalangan dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan. Alih-alih menyelesaikan masalah, mereka akan terjebak pada masalah baru. Munculnya kesenjangan sosial yang begitu lebar, seperti yang digambarkan oleh Petras dan Veltmeyer, di Argentina misalnya, rasio pendapatan tertinggi dan terendah adalah 8:1 pada tahun 1975 dan pada tahun 1997 menjadi 25:1 (2002: 156). Di Chili pada tahun 1980-1989 kondisinya jauh lebih buruk. Bahkan kesenjangan pendapatan di Chili adalah salah yang terburuk di Amerika Latin pada masa itu. Hal ini bisa dilihat dari data antara tahun 1980-1989 di mana 10 persen penduduk terkaya menguasai 36,5 persen pendapatan nasional dan meningkat menjadi 46,8 persen dalam rentang waktu tersebut. Di sisi lain, pendapatan 50 persen penduduk termiskin melorot dari 20,4 persen pada 1980 menjadi 16,8 persen pada tahun 1989 (Kangas dalam Robinson (ed.), 2003: 51).

Demikian juga dengan masalah kemiskinan. Selama reformasi struktural

sepanjang 1990an, diperkirakan angka kemiskinan meningkat dari 35 persen menjadi 45 persen (Petras dan Veltmeyer, 2002: 157). Reformasi neoliberal menjadikan semakin meningkatnya pengangguran, berkurangnya pendapatan buruh, dan bangkrutnya berbagai perusahaan-perusahaan lokal seperti yang terjadi di Mexico pada tahun 1995. 60 persen perusahaan-perusahaan kecil yang mempekerjakan 80 persen angkatan kerja Mexico telah mem-PHK buruh-buruhnya (Heredia dan Purcell dalam Robinson (ed.), 2003: 65).

Di Bolivia pada masa-masa awal reformasi neoliberal, 120 perusahaan lokal bangkrut karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki kapital besar. Antara tahun 1988-1991 upah riil juga turun sebanyak 22 persen (Avirgan, Parsons dan Harmond dalam Robinson (ed.) 2003: 127).

Masalah-masalah tersebut kemudian ditambah dengan pencabutan subsidi yang mengakibatkan harga bahan bakar, makanan dan berbagai layanan sosial menjadi semakin mahal. Sebagai contoh, di Peru ketika presiden Fujimori naik tahun 1990, dia menaikkan harga BBM 3000%, air 1300% dan tarif listrik 5300% (Hays-Mitchell dalam Kelly, <http://www.citizenspress.org/node/14>). Dalam konteks permasalahan utang, pada tahun 1970 hutang negara-negara Amerika Latin berjumlah sekitar US\$ 27 milyar. Jumlah tersebut berlipat menjadi US\$231 milyar pada tahun 1980, dan menjadi US\$ 650 Milyar tahun 1997 (Petras, 2003: 143). Kebijakan neoliberal yang diimplementasikan di Amerika Latin agar negara-negara yang terkena krisis tersebut dapat membayar utangnya, dalam realitanya, menjadikan mereka berhutang 3 kali lipat lebih banyak antara tahun 1980 – 1997.

Kemunduran Neoliberalisme dan Kebijakan Populis Rezim *Pink Tide*

Neoliberalisme di Amerika Latin sendiri, saat ini, sedang mengalami kemunduran . Kemunculan pemimpin-pemimpin kiri baru yang mengusung sosialisme (dikenal dengan *pink tide* atau neo-populisme atau neo-strukturalisme) hampir menyapu bersih atau setidaknya mereformasi berbagai kebijakan yang berbau neoliberal dari pemerintahan sebelumnya. Walaupun tidak semua pemimpin-pemimpin tersebut bersikap radikal seperti Hugo Chavez dan Evo Morales, tapi menurut Maxwell A. Cameron dari *British Columbia University*, ada 3 hal yang menjadi karakter dasar dari sepak terjang mereka, yaitu: *pertama*, komitmen yang tinggi terhadap egalitarisme, *kedua*, keinginan yang kuat menggunakan negara untuk mengimbangi pasar, dan *ketiga*, partisipasi rakyat dalam perubahan (Cameron dalam Imam Subono dalam Soyomukti, 2003: 12).

Yang juga menjadi perhatian dari kebangkitan kiri di Amerika Latin ini adalah kebangkitan mereka tidaklah sama dengan gelombang kiri yang revolusioner seperti di Soviet, China, dan Vietnam. Perbedaan ini bisa dilihat dari beberapa

sudut, misalnya: *Pertama*, naiknya pemimpin-pemimpin tersebut melalui jalur pemilu yang demokratis. *Kedua*, para pemimpin-pemimpin tersebut berbeda dalam cara dan gayanya masing-masing. Bachelet yang moderat (Chili), Lula yang agak kritis (Brazil), dan ada pula yang radikal seperti yang ditunjukkan oleh Chavez (Venezuela) dan Morales (Bolivia). *Ketiga*, berbeda dengan semangat kiri di masa lalu, mereka tidak bersifat isolasionis dalam perekonomiannya, dan *Keempat*, kerja keras mereka dalam membangun perlawanan terhadap hegemoni neoliberal seperti ALBA (*Bolivarian Alternative for the Latin America*) (Imam Subono dalam Soyomukti, 2003: 18-19). Karena perbedaan inilah Hugo Chavez menyebut kebangkitan kiri ini sebagai sosialisme abad 21.

Bangkitnya kaum progresif kiri di Amerika Latin kemudian mereformasi berbagai kebijakan pro pasar rezim neoliberal sebelumnya. Kehendak untuk keadilan ekonomi dan politik (perlawanan terhadap ketertindasan dan diskriminasi ras) dalam bentuk: penolakan terhadap ALCA; penguasaan kekayaan alam; penyediaan lapangan pekerjaan, redistribusi tanah dan permodalan bagi pertanian, merupakan harga mati (Ariane, dalam <http://lmnd.wordpress.com/2007/08/12/kebangkitan-amerika-latin-melawan-globalisasi-neoliberal/>).

Partisipasi demokratik rakyat juga begitu dinamis terjadi. Di Venezuela dan Bolivia, lingkaran-lingkaran Bolivarian, komite-komite misi sosial, dewan-dewan perencanaan lokal (komunitas), persatuan serikat-serikat buruh, melalui serangkaian referendum rakyat, terus dimajukan dalam bentuk mobilisasi-mobilisasi sosial untuk mempertahankan Revolusi Bolivarian Venezuela. Rakyat memobilisasi dirinya untuk mempertahankan hak ekonomi dan sosialnya. Penguasaan sumber-sumber pendapatan yang penting bagi negara menjadi landasan bagi terwujudnya program-program mendesak rakyat. Di Venezuela, tak kurang dari US\$ 2 milyar rata-rata pertahun, bahkan tahun 2006 mencapai US\$ 4,5 milyar, dialokasikan pemerintah (dari keuntungan minyak dan juga dari Dana Pembangunan Nasional) untuk program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kredit, dan pelatihan kerja (Ariane, 2007).

Program-program kesehatan gratis *Barrio Adentro I* dan *II*, pendidikan gratis *Robinson I* dan *II* serta *Ribas* dan *Sucre* merupakan kebijakan pemerintah Venezuela untuk memassalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas untuk rakyat. Selain itu, pemerintah juga me-launch program peningkatan teknologi dan tenaga produktif untuk melepaskan ketergantungan dari bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Lebih jauh, pemerintah Venezuela juga menggalakkan Misi *Ciencia* (*science*) dengan

program antara lain: penyediaan perangkat lunak gratis dan komputerisasi tingkat dasar di seluruh sekolah dasar; membangun pabrik-pabrik petrokimia; bekerja sama dengan Iran mendirikan stasiun hidroelektrik di La Vuetosa; membangun jalan bawah tanah di Los Teques; mendirikan tenaga pembangkit termoelektrik; teknologi penerbangan; laboratorium dengan sistim analisa-ultra-mikro; membuat peralatan-peralatan elektroterapi, hidroterapi, mekanikal terapi, gimnasium, terapi okupasional, defektologi, pelatihan hambatan berbicara, dan podologi. Alat penyulingan gula; traktor untuk pertanian; penggilingan benih; mesin pembajak; truk pabri, kendaraan umum dan umum; mesin mekanik penggali; serta bis, kesemuanya sudah dan akan diproduksi di dalam negeri (Ariane, *Ibid*).

Dengan adanya program-program yang menyentuh rakyat, terutama dalam pendidikan, kesehatan dan redistribusi pendapatan, Venezuela mampu secara signifikan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan yang akut yang pernah mendera bangsa itu pada masa neoliberal. Jika di masa rezim neoliberal, 40 persen kekayaan Venezuela dinikmati oleh 10 penduduk terkaya maka pada era Hugo Chavez 40 persen dari pendapatan negara digunakan untuk untuk subsidi program-program kerakyatan.

Program-program populis ini menjadikan Venezuela memiliki tingkat kesenjangan yang terendah di Amerika Latin. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat indeks gini sebesar 0,42 yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan indeks rata-rata Amerika Latin yang 0,52. Indeks pembangunan manusia Venezuela juga merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Menurut preview laporan tahunan PBB Program Pembangunan, Venezuela memiliki indeks pembangunan lebih tinggi dari 118 negara. Pengukuran yang indeks yang berkisar dari 0 sampai 1, di mana kurang dari 0,49 menunjukkan pembangunan manusia yang rendah, 0,49-0,79 adalah tingkat menengah pembangunan, dan 0,8 - 1 adalah tingkat tinggi. Venezuela saat ini memiliki indeks 0,834, naik dari angka 0,78 pada dekade yang lalu. (dalam <http://theactivist.org/blog/poverty-and-inequality-decline-in-venezuela>).

Kesimpulan

Sejak pertama kali dicetuskannya, pembangunan senantiasa diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai keberhasilan pembangunan. Memasuki dasawarsa 1980an, berkembang model pembangunan neoliberalisme yang mendasarkan ekonomi pada pasar bebas. Kondisi ini menjadikan kesenjangan yang ada di banyak negara menjadi semakin lebar, sebab model ini bias terhadap kepentingan kelas *the haves* dan memarjinalkan kelas pekerja dan rakyat miskin.

Pada akhir 1990an, berkembang sebuah model baru pembangunan di Amerika

Latin. Model ini berkembang dikarenakan kekecewaan terhadap model neoliberalisme yang banyak memberikan malapetaka pada negara-negara tersebut. Dalam model ini, pembangunan dilakukan dengan mendahulukan program-program populis, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perumahan, dan lain sebagainya.

Hasilnya, di negara-negara *pink tide* Amerika Latin seperti Venezuela, kesenjangan sosial dalam masyarakat menjadi teredusir secara signifikan. Venezuela saat ini memiliki tingkat kesenjangan sosial yang terendah di Amerika Latin, hal tersebut dibuktikan dengan indeks gini-nya yang hanya 0,42 persen. Tingkat indeks pembangunan manusianya, juga salah satu yang tertinggi di dunia. Negara-negara Amerika Latin membuktikan, dengan kebijakan-kebijakan populisnya, mereka mampu mereduksi tingkat kesenjangan yang lahir pada masa neoliberal.

Daftar Pustaka

Buku:

- Budiman, Arif, 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia: Jakarta.
- Firebaugh, Glenn, 2003. *The new geography of global income inequality*, Massachuset: Harvard University Press.
- Grusky, David B. dan Ravi Kanbur, 2006. *Poverty and Inequality*, Stanford University Press: Stanford.
- Gwynne, Robert N. dan Cristobal Kay. *Latin America Transformed: Globalisation and Modernity*, Edisi Kedua, New York: Hodder Arnold.
- Harvey, David, 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapital*, Yogyakarta: Resist Book.
- Kirby, Peadar, 2003. *Introduction to Latin America*, London: Sage Publications.
- Munck, Rolando, 2003. *Contemporary Latin America*, London: Palgrave.
- Peet, Richard dan Elaine Hartwick, 1999, *Theories of Development*, New York: The Guilford Press.
- Petras, James dan Henry Veltmeyer, 2002. *Imperialisme abad 21*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Robinson, William, 2003. *Hantu Neoliberalisme*, Jakarta: C:Books.

Soyomukti, Nurani, 2008. *Hugo Chaves vs Amerika Serikat*, Jogjakarta: Garasi.

Steger, Manfred, 2002, *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*, Yogyakarta: Lafadl.

Winarno, Budi, 2003. *Globalisasi dan krisis Demokrasi*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Online Articles

Anonim, 2008, *Poverty and Inequality Decline in Venezuela*,
<http://theactivist.org/blog/poverty-and-inequality-decline-in-venezuela>
diakses apada 23 Juni 2010

Anonim, *New Dimensions of Social Inequality*,
<http://www.ucl.ac.uk/ceelbas/research/socialinequality> diakses pada 23
juni 2010.

Ariane, ZeLy, 2007, *Kebangkitan Amerika Latin Melawan Globalisasi Neoliberal*,
<http://lmnd.wordpress.com/2007/08/12/kebangkitan-amerika-latin-melawan-globalisasi-neoliberal/> diakses tanggal 24 Juni 2010.

Efendi, 2007, *Ketimpangan Ekonomi Kian Melebar*,
<http://www.mudrajad.com/upload/Ketimpangan%20Pendapatan%20Melebar.pdf> diakses pada 23 Juni 2010 .

Kelly, Laura, 2008, *Neoliberalism in Latin America*,
<http://www.citizenspress.org/node/14>, diakses tanggal 5 November
2009, pukul 23.00.